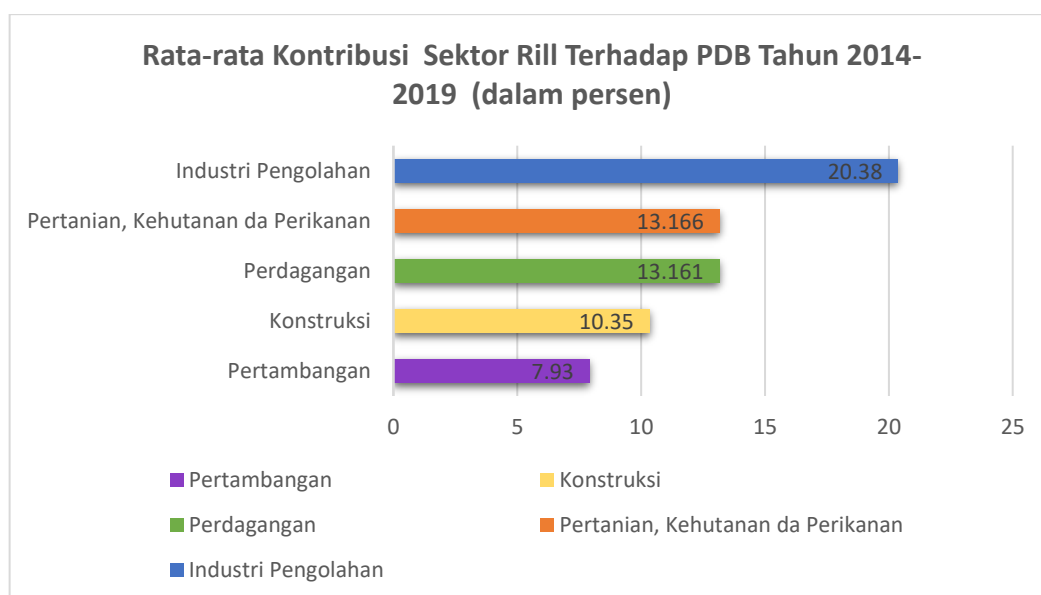


# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1.Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk negara yang sedang aktif dalam melakukan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Hal tersebut menjadi salah satu faktor meningkatnya peran sektor konstruksi terhadap perekonomian Indonesia (Badan Pusat Statistik 2019). Menurut Badan Pusat Statistik (2020), “Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor riil yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia”. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut (Badan Pusat Statistik 2020):



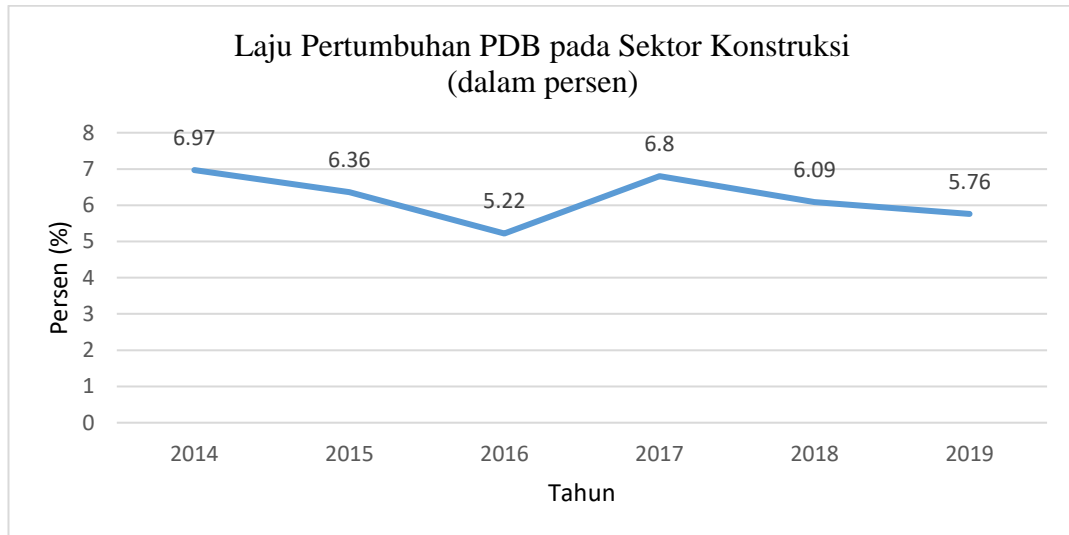
**Gambar 1.1**

### **Rata-rata Kontribusi Sektor Riil Terhadap PDB Tahun 2014-2019.**

Sumber: (Badan Pusat Statistik 2020)

Berdasarkan Gambar 1.1, rata-rata kontribusi sektor konstruksi terhadap PDB pada tahun 2014 hingga 2019 yaitu sebesar 10,35% sehingga menjadikan konstruksi menempati posisi ke-4 sebagai sektor riil penyumbang PDB terbesar di Indonesia setelah sektor industri pengolahan, sektor pertanian dan sektor perdagangan. Hal ini dikarenakan salah satu fokus pemerintah Indonesia yaitu pada pembangunan infrastruktur yang telah dimulai sejak tahun 2014 dan masih berlanjut hingga sekarang (setneg.go.id 2019). Namun, seiring dengan kontribusi sektor konstruksi yang menempati posisi ke-4 sektor riil penyumbang PDB terbesar

di Indonesia, laju pertumbuhan PDB pada sektor konstruksi mengalami fluktuasi yang cenderung menurun dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Adapun laju pertumbuhan PDB pada sektor konstruksi dari tahun 2014 hingga tahun 2019 sebagai berikut (Badan Pusat Statistik 2019):



**Gambar 1.2**

**Grafik Laju Pertumbuhan PDB Sektor Konstruksi**

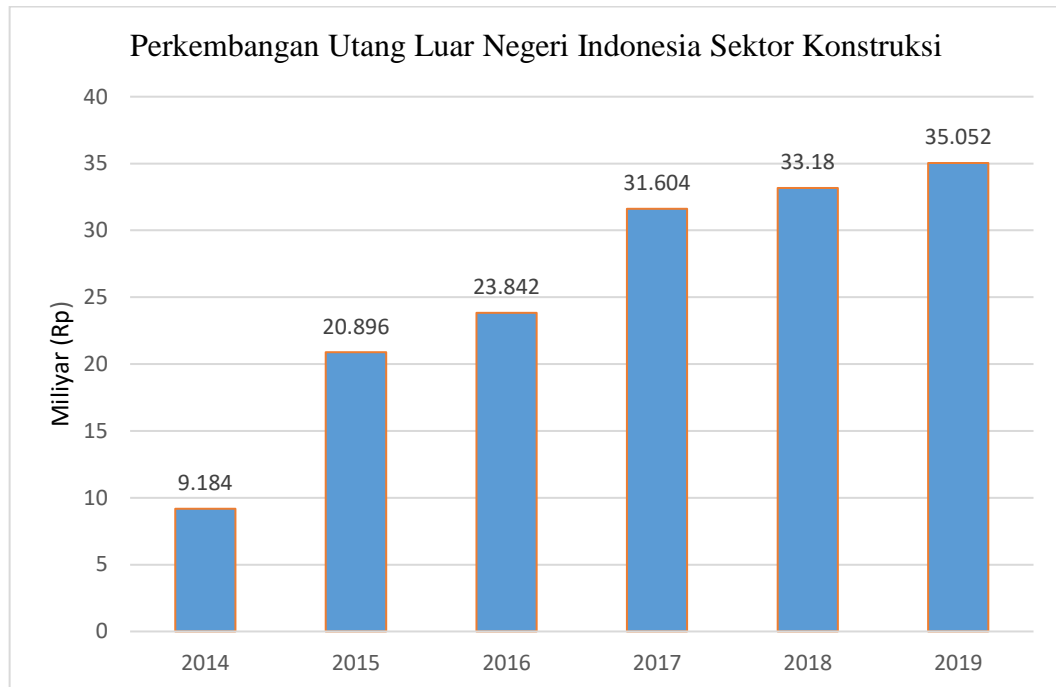
Sumber: (Badan Pusat Statistik 2019)

Laju pertumbuhan sektor konstruksi dari tahun 2014 hingga tahun 2019 mengalami fluktuasi. Tahun 2014 hingga tahun 2016 mengalami penurunan yang semula sebesar 6,97% menurun menjadi sebesar 5,22%. Lalu meningkat kembali pada tahun 2017 sebesar 1,58% menjadi 6,8%. Dan pada tahun 2017 hingga tahun 2019, laju pertumbuhan PDB pada sektor konstruksi kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 5,76%.

Pardede (2000) menyatakan bahwa pada periode 1988-1989 hingga 1997-1998 sektor konstruksi memiliki pertumbuhan paling pesat. Tetapi, ketika krisis terjadi, sektor konstruksi pun mengalami penurunan yang paling besar. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar pembiayaan sektor konstruksi dibiayai oleh utang luar negeri, terutama utang swasta. Krisis yang terjadi pada tahun 1997 menyebabkan turunnya kurs Rupiah terhadap *Dollar*, sehingga menyebabkan pengusaha kesulitan dalam mengembalikan pinjaman yang diberikan.

Jumlah Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia untuk sektor konstruksi pada tahun 2014 hingga 2019 terus meningkat. Tahun 2014 yang semula 9,187 juta USD menjadi 35,052 juta USD pada tahun 2019. Peningkatan yang signifikan terjadi

pada tahun 2014 yaitu 9,184 juta USD menjadi 20,896 juta USD pada tahun 2015. Perkembangan ULN di Indonesia pada tahun 2014 hingga 2019 dapat dilihat pada Gambar 1.3 (Bank Indonesia 2019):



**Gambar 1.3**

**Perkembangan Utang Luar Negeri Indonesia Sektor Konstruksi**

Sumber: (Bank Indonesia 2019) (diolah)

Menurut Bank Indonesia (2019), pengelolaan ULN pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dengan porsi terbesar pada beberapa sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (19,1% dari total ULN pemerintah), sektor konstruksi (16,6%), sektor jasa pendidikan (16,2%), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,4%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (13,3%) (Bank Indonesia 2019).

Kelemahan skema pembiayaan sektor konstruksi yang masih mengandalkan utang luar negeri tersebut harus dapat diatasi oleh alternatif lain. Adapun sumber dana alternatif lainnya yang dimungkinkan bagi pembiayaan infrastruktur yaitu berupa dana dari lembaga keuangan seperti pembiayaan perbankan, SBSN atau sukuk pasar modal, dana asuransi dan dana pensiun (simantu.pu.go.id 2017).

Kemudian permasalahan yang muncul pada sektor konstruksi yaitu kurangnya pembiayaan pada sektor konstruksi (kontan.co.id 2019). Rendahnya pembiayaan

sektor konstruksi disebabkan oleh karakteristik dari sektor konstruksi yang memerlukan dana dalam jumlah besar serta jangka waktu pengembalian yang relatif panjang (Otoritas Jasa Keuangan 2015). Dalam pencapaian pembangunan, sektor konstruksi memerlukan peran perbankan untuk membantu akses permodalan melalui pemberian kredit ataupun pembiayaan syariah yang cukup (tribunnews.com 2017). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati, Nuryantono, dan Beik (2017) bahwa salah satu pihak yang memiliki peran terhadap sektor konstruksi yaitu sektor perbankan. Kemudian, adapun alokasi jumlah penyaluran pembiayaan perbankan syariah berdasarkan sektor ekonomi yaitu:

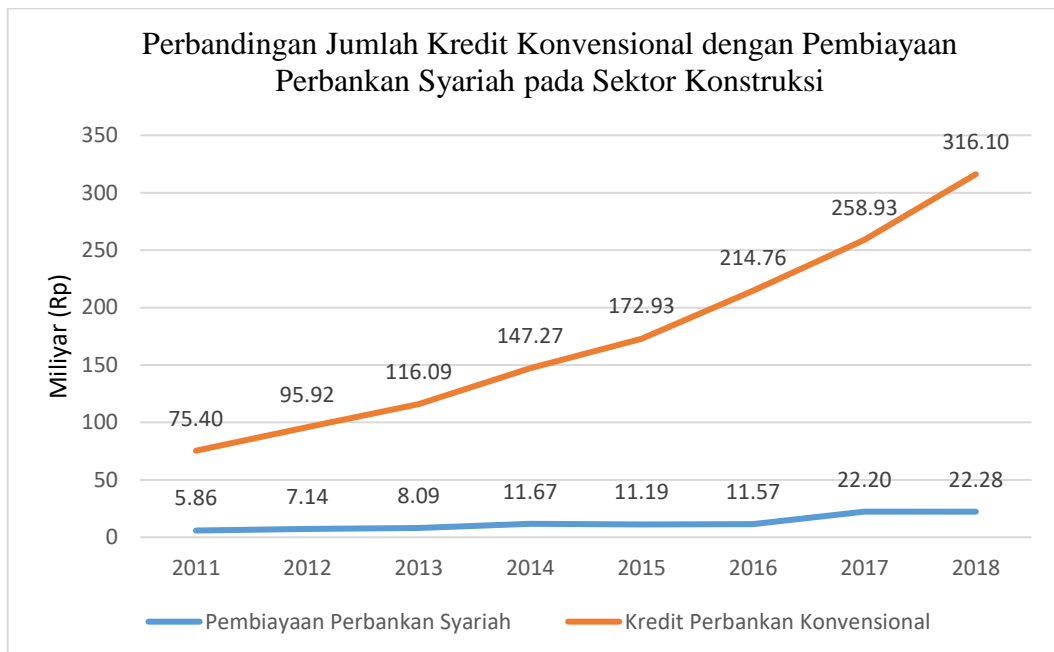
**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Sektor Ekonomi**

No.	Sektor	Besaran Pembiayaan
1.	Rumah Tangga	41,48%
2.	Perdagangan Besar dan Eceran	11,16%
3.	Industri Pengolahan	7,77%
4.	Konstruksi	7,47%
5.	Perantara Keuangan	6,02%

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan 2018)

Berdasarkan Tabel 1.1, alokasi penyaluran pembiayaan perbankan syariah pada sektor konstruksi di Indonesia menempati posisi ke-2 terendah yaitu sebesar 7,47%. Artinya, alokasi pembiayaan perbankan syariah pada sektor konstruksi masih berada di bawah sektor rumah tangga, perdagangan besar dan eceran, serta sektor industri pengolahan. Kemudian, menurut Kusumawati (2013) perbankan syariah mampu menawarkan pembiayaan yang menguntungkan bagi sektor konstruksi karena perbankan syariah memiliki keunggulan dibandingkan dengan perbankan konvensional yaitu dengan tidak adanya bunga dan menggantinya menjadi sistem *profit loss sharing*. Sistem bagi hasil dapat mengurangi beban para pengusaha sektor konstruksi karena adanya pembagian risiko antara pihak bank dengan nasabah peminjam. Oleh karena itu, perbankan syariah mampu menjadi alternatif bagi pengusaha sektor konstruksi untuk memperoleh bantuan permodalan. Adapun perbandingan jumlah kredit yang disalurkan oleh perbankan konvensional dengan

pembiayaan perbankan syariah pada sektor konstruksi sebagai berikut (Otoritas Jasa Keuangan 2019):

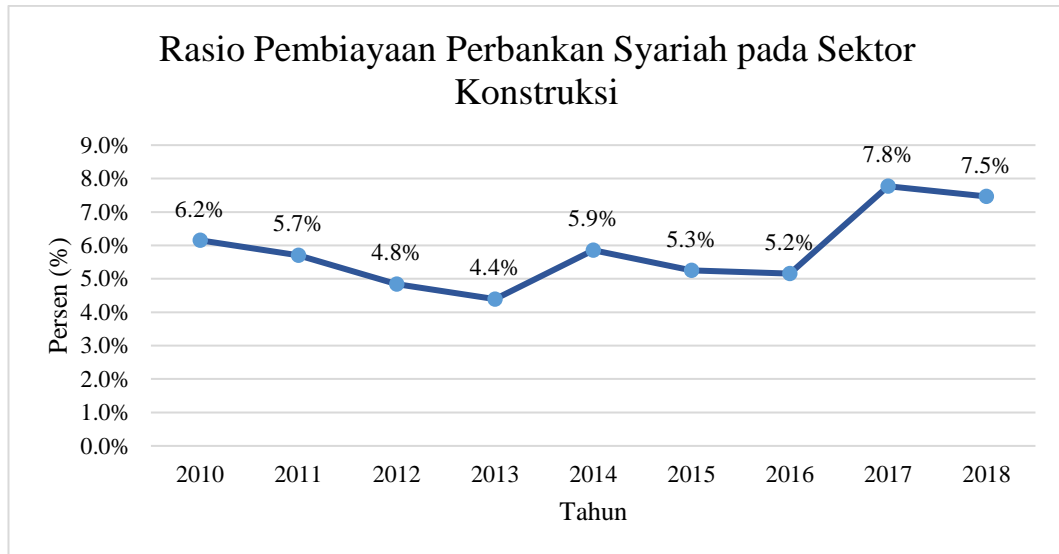


**Gambar 1.4**

**Grafik Perbandingan Jumlah Kredit Konvensional dengan Pembiayaan Perbankan Syariah (BUS dan UUS) pada Sektor Konstruksi**

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan 2019)

Gambar 1.4 menunjukkan perbandingan jumlah kredit konvensional dengan pembiayaan perbankan syariah (BUS dan UUS) pada sektor konstruksi di Indonesia pada tahun 2011 hingga tahun 2018 yang cenderung mengalami peningkatan pada keduanya. Berdasarkan grafik perbandingan tersebut dapat terlihat bahwa meskipun jumlah pembiayaan perbankan syariah pada sektor konstruksi cenderung mengalami peningkatan, namun peningkatan jumlah kredit konvensional jauh lebih tinggi dibandingkan pembiayaan perbankan syariah pada sektor konstruksi. Artinya, peningkatan jumlah pembiayaan perbankan syariah pada sektor konstruksi terbilang lambat. Kemudian jumlah pembiayaan yang meningkat pada perbankan syariah diduga dikarenakan adanya peningkatan aset perbankan syariah dan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun oleh perbankan syariah (Bakti 2017). Namun, peningkatan jumlah aset, DPK, dan jumlah pembiayaan tersebut tidak diikuti oleh peningkatan rasio pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah pada sektor konstruksi. Adapun datanya sebagai berikut (Otoritas Jasa Keuangan 2019):



**Gambar 1.5**

**Grafik Rasio Pembiayaan Perbankan Syariah Pada Sektor Konstruksi**

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan 2019) (diolah)

Berdasarkan Gambar 1.5, persentase rasio pembiayaan sektor konstruksi perbankan syariah berfluktuasi dan mengalami penurunan hingga tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa total pembiayaan yang meningkat pesat belum diikuti dengan pertumbuhan pembiayaan pada sektor konstruksi yang merupakan salah satu sektor produktif. Jika kondisi tersebut terus dibiarkan, maka akan mengganggu eksistensi sektor konstruksi dan diduga dapat menyebabkan kebangkrutan. Hal ini didukung oleh pernyataan Calon Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Wilayah Timur yang menyatakan bahwa banyak kontraktor yang tutup usaha akibat kekurangan modal (liputan6.com 2019).

Tumiwa, Rumate, dan Rotinsulu (2019), menyatakan bahwa terdapat faktor-faktor yang memengaruhi besarnya pembiayaan perbankan sektor konstruksi yaitu dapat berasal dari kondisi internal maupun kondisi eksternal perbankan. Sedangkan menurut Almas (2018), pembiayaan ataupun kredit perbankan dapat dipengaruhi oleh suku bunga, persepsi bank terhadap prospek usaha debitur dan kondisi internal, seperti *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Net Performing Loan (NPL)* atau *Non Performing Financing (NPF)* dan *Loan to Deposit Ratio (LDR)*. Kemudian, Isnu dan Mahfudz (2016) menyatakan bahwa pembiayaan yang semakin menurun dapat disebabkan oleh rendahnya rasio FDR. Selain itu, Kholipah dan kurniasih (2017), menyatakan bahwa inflasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah pada sektor ekonomi.

Penelitian ini menggunakan pembiayaan sektor konstruksi sebagai variabel dependen, kemudian variabel independen yang digunakan yaitu tingkat kecukupan modal yang diproksikan dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), karena merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Bakti (2017), menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan perbankan. Tingginya CAR mengindikasikan bahwa bank tersebut telah mempunyai modal yang cukup baik dalam menunjang risiko-risiko yang ditimbulkan termasuk di dalamnya risiko pembiayaan. Dengan modal yang besar maka suatu bank dapat menyalurkan pembiayaan lebih banyak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anwar dan Miqdad (2017), Khasanah dan Meiranto (2015), Annisa dan Fernanda (2017) dan Nahrawi (2017). Namun penelitian yang dilakukan oleh Ali dan Miftahurrohman (2016), Darmawan, Wahyuni dan Atmadja (2017), menunjukkan hasil yang berbeda yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Azka, Hardiwinoto, dan Wibowo (2018) serta Nurhasanah dan Melzatia (2019), menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.

Kemudian variabel lain yang digunakan yaitu tingkat likuiditas yang diproksikan dengan indikator *Financing to Deposit Ratio* (FDR) karena menurut Isnu dan Mahfudz (2016) menyatakan bahwa pembiayaan yang semakin menurun dapat disebabkan oleh rendahnya rasio FDR. Begitupun sebaliknya, semakin tinggi rasio FDR menunjukkan kemampuan bank dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah yang semakin meningkat (Aida dan Syaichu 2016). Oleh sebab itu, hubungan antara FDR dan pembiayaan ini searah atau positif.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adzimatunur, Hartoyo dan Wiliasih (2015), Kusumawati (2013), Purnama (2012), Effendi dan Yasmin (2017), serta Nasution dan Ulum (2015), Rachmawaty (2017) yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Giannini (2013), Prastanto (2013), dan Wahab (2014) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan perbankan syariah.

Selanjutnya variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah SBIS, karena SBIS memiliki jalur transmisi tersendiri terhadap sektor riil yang

mana instrumen ini akan memengaruhi besarnya pembiayaan dan penyaluran kepada sektor riil (Novianti, Lubis dan Septindo 2016). Purnama (2012) menyatakan bahwa besarnya pembiayaan tidak lepas dari sedikitnya bank-bank syariah yang menempatkan dananya dalam bentuk SWBI, begitupun sebaliknya. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Qolby (2013) bahwa hubungan yang negatif ini dikarenakan SBIS merupakan bukti penitipan dana perbankan syariah di Bank Indonesia. Jika dana perbankan syariah dialokasikan kepada SBIS, justru akan mengurangi potensi meningkatkan jumlah penyaluran dana atau pembiayaan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dahlan (2014), Ma'arifa (2015), dan Kusumawati (2013), yang menyatakan bahwa SBIS berpengaruh negatif. Namun berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Jaya, Rindayati, dan Ali (2015), Beik dan Aprianti (2013), Mardani (2016), dan Suryono (2016) yang menyatakan bahwa SBIS berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan serta masih adanya *research gap* dalam penelitian yang telah dilakukan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Faktor Pembiayaan Perbankan Syariah pada Sektor Konstruksi di Indonesia”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi masalah yang terdapat dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Konstruksi merupakan penyumbang PDB ke-4 sektor riil terbesar, namun laju pertumbuhan PDB pada sektor konstruksi cenderung lambat (Badan Pusat Statistik 2019).
2. Kurangnya pembiayaan pada sektor konstruksi dikarenakan sektor konstruksi membutuhkan modal yang besar dan pengembalian dana yang relatif lama (Otoritas Jasa Keuangan 2015).
3. Jumlah Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia untuk sektor konstruksi pada tahun 2014 hingga 2019 terus meningkat (Bank Indonesia 2019).
4. Peningkatan jumlah pembiayaan perbankan syariah pada sektor konstruksi dari tahun 2011 hingga tahun 2018 jauh lebih rendah dibandingkan dengan kredit perbankan konvensional (Otoritas Jasa Keuangan 2019).



5. Proporsi penyaluran pembiayaan perbankan syariah pada sektor konstruksi di Indonesia menempati posisi ke-2 terendah yaitu sebesar 7,47% (Otoritas Jasa Keuangan 2018).
6. Persentase rasio pembiayaan perbankan syariah sektor konstruksi pada tahun 2010 hingga tahun 2018 mengalami fluktuasi dengan rasio pada tahun 2017 sebesar 7,8% menurun menjadi 7,5% pada tahun 2018 (Otoritas Jasa Keuangan 2019).

### **1.3. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan melalui pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan tingkat pembiayaan perbankan syariah, tingkat kecukupan modal, tingkat likuiditas, dan SBIS pada sektor konstruksi di Indonesia?
2. Apakah tingkat kecukupan modal berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan perbankan syariah pada sektor konstruksi di Indonesia?
3. Apakah tingkat likuiditas berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan perbankan syariah pada sektor konstruksi di Indonesia?
4. Apakah jumlah SBIS berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan perbankan syariah pada sektor konstruksi di Indonesia?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Menguji *Anticipated Income Theory* dengan menganalisis pengaruh:

1. Tingkat kecukupan modal terhadap tingkat pembiayaan perbankan syariah pada sektor konstruksi di Indonesia.
2. Tingkat likuiditas terhadap tingkat pembiayaan perbankan syariah pada sektor konstruksi di Indonesia.
3. Jumlah SBIS terhadap tingkat pembiayaan perbankan syariah pada sektor konstruksi di Indonesia.

## 1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan agar dapat dijadikan sebagai bahan diskusi maupun pembelajaran serta dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu di bidang ilmu ekonomi dan keuangan Islam khususnya mengenai pembiayaan perbankan syariah pada sektor konstruksi di Indonesia, serta pengaruh tingkat kecukupan modal, tingkat likuiditas dan jumlah SBIS terhadap pembiayaan perbankan syariah pada sektor konstruksi di Indonesia. Kemudian dapat dijadikan sebuah rujukan lebih lanjut bagi penelitian selanjutnya.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi bagi *stakeholder*, baik itu perbankan syariah maupun regulator atau pemerintah khususnya mengenai pengaruh kecukupan modal, tingkat likuiditas dan jumlah SBIS terhadap pembiayaan perbankan syariah pada sektor konstruksi di Indonesia sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan atau kebijakan terutama dalam bidang pembiayaan perbankan syariah pada sektor konstruksi di Indonesia.

